PENGUATAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Emmy Triana Meinisa
Universitas Trunojoyo Madura

I. PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 merupakan suatu wabah yang kemarin banyak menyerang hampir Negara diseluruh dunia. Pusat kesehatan dunia (WHO) memberikan himbauan kepada setiap orang untuk melakukan *social distancing*, yang mana hal ini memeiliki tujuan untuk memutus rantai penyebaran karena dilarang melakukan kontak dekat dengan orang yang terinveksi covid. *Center for Disasea Control dan Prevention* (CDC) mengartikan kegiatan *social distancing* ini sebagai tindakan menghindari pertemuan secara massal, menjauhi perkumpulan, dan memberikan jarak antar sesorang kurang lebih berjarak 2 meter. Termasuk pemberlakuan kegiatan beekrja, sekolah, dan beribadah dilakukan secara daring atau tanpa keluar rumah. Tentunya dengan adanya fenomena ini mengakibatkan semua kegiatan yang biasa dilakukan diluar rumah terganggu. Penyebaran virus ini memiliki dampak besar pada sector perekonomian suatu daerah bahkan negara-negara besar juga mengalami guncangan ekonomi karena wabah ini.

Di Indonesia sendiri kasus covid-19 tembus pada angka 6.811.818 juta orang yang terkonfirmasi positif terkena covid per 27 juni 2023 (covid19.go.id, 2023). Keadaan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk cepat tanggap dalam mengurangi dampak penyebaran virus ini. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak terhadap aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya hingga berdampak juga terhadap sector pariwisata dan manufaktur yang berjalan. Banyak tenaga kerja berkurang, bertambahnya pengangguran, dan tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan. Keadaan tersebut menyebabkan tingkat penerimaan berupa pajak penghasilan (PPh) yang diterima oleh negara berkurang. Keadaan perekonomian negara yang semakin terpuruk mendorong pemerintah untuk mengelola perekonomian dengan menggunakan instrument fiskal. Penerapan kebijakan fiskal ini memberikan pemerintah kesempatan untuk memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional, kesempatan untuk kerja, peluang berinvestasi, dan wewenang dalam hal distribusi pendapatan nasional Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020).

Turunnya tingkat kesehatan dan naiknya tingkat pegangguran akibat dampak dari covid mendorong pemerintah untuk memberikan solusi melalui kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah harus berfikir keras dalam menyeimbangkan tingkat kesehatan dan juga perekonomian negara. Disatu sisi, pemerintah harus mengupayakan penekanan peurunan kasus covid yang berefek terhadap penurunan aktivitas ekonomi. Disisi lain pemerintah memberikan

pelonggaran mobilitas kepada masyarakat yang bisa memulihkan aktivitas ekonomi, namun tingkat penyebaran virus juga mengancam kesehatan masyarakat. Kebijakan fiskal dipilih pemerintah untuk mendukung agar tingkat percepatan pembangunan ekonomi dapat kembali normal juga dapat meminimalisir kasus kesehatan. Pemerintah perlu mengupayakan pengeluaran biaya untuk menangani kasus virus, namun pemulihan aktivitas ekonomi tetap berjalan dalam situasi pandemi yang sudah terkendali. Kebijakan fiskal mempunyai dua komponen yang terdiri dari penerimaan berupa pajak dan bukan pajak, yang kedua berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Menurut Ismail (2018) masyarakat mempunyai peran sebagai pembayar pajak, yang menjadi wujud partsisipasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Penerimaan dan penegeluaran pemerintah tercatat juga berperan besar dalam upaya penanggulangan dampak dari pandemi yang terjadi.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan pada paragraf diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama bahasan penelitian ini meliputi : 1. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pendapatan negara sudah bisa menjaga stabilitas perekonomian pasca terjadi pandemi covid-19? 2. Bagaimana strategi pemerintah dalam memulihkan perekonomian negara, melihat banyak negara-negara maju yang perekonomiannya tergunjang sehingga terkendalnya akses pasar internasional? 3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian negara pasca pandemi melalui penerapan kebijakan fiskal sudah berhasil?.

Tujuan dari penulisan karya ini adalah guna menganalisis kebijakan fiskal pemerintah yang diterapkan pada saat pandemi dapat berhasil atau tidak dalam mengantisipasi turunnya tingkat perekonomian dan melihat upaya pemerintah dalam memperkuat instrument guna menaikkan tingkat perekonomian negara. Juga melihat penerapan strategi apakah sudah sesuai pada apa yang diharapkan agar ekonomi negara tidak terguncang karena adanya pandemi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang Relevan

Teori yang diambil sebagai cikal bakal lahirnya kebijakan fiskal yakni adalah Teori Keynes/Keynesian. Setiawan (2018) menyatakan bahwa teori ini menentang adanya pendapat dari teori klasik yang memaparkan bahwa belanja yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan tingkat belanja swasta karena teori ini berpedoman dengan kondisi yang *full employment*. Berbeda dengan teori Keynesian yang menurut Swasito (2020) berpendapat bahwa campur tangan

pemerintah itu perlu untuk mencapai titik perekonomian yang baik. Teori Keynes ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom bernama John Maynard Kenyes dalam bukunya yang berjudul The grand theory of employment. Pada pendekatan Keynes, adanya kebijakan fiskal mampu mendorong pergerakan perkonomian karena adanya pengeluaran pemerintah yang meningkat atau adanya penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan yang mempunyai dampak multiplayer caranya dengan menstimulasi permintaan barang untuk konsumsi rumah tangga. Pada pemotongan pajak yang dilakukan pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan disposibel yang pada akhirnya juga akan berpegaruh terhadap permintaan.

Kebijakan fiskal berpengaruh besar terhadap keseimbangan di sektor barang dan jasa yang mana kedua sektor tersebut juga dapat mempengaruhi keseimbangan sektor ekonomi lainnya. Dalam pelaksnaanya kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah dan Dewa Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara mempertimbangkan besaran pajak yang ditetapkan untuk seluruh para wajib pajak. Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengelola semua keuangan negara untuk mendorong perekonomian nasional mulai dari urusan produksi, investasi, konsumsi, kesempatan kerja, bahkan kestabilan harga yang ada dipasaran (Fathurrahman, 2012). Kebijakan fiskal dinegara Indonesia ini digambarkan pada bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana pemerintah mempunyai wewenang dalam menyesuaikan besaran pendapatan dan penegeluaran anggaran yang sebelumnya telah ditentukan melalui perubahan besaran pajak yang berlaku (Feranika, 2020).

Kebijakan fiskal berpengaruh penting terhadap keterkaitanya dengan penetapan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak, karena penetapan tersebut bisa mempengaruhi meningkatnya atau menurunnya pendapatan pemerintah. Sehingga pemeritah dapat menyusun strategi agar lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengatasi permasalahan ketidakmerataan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan rakyat disebabkan karena peningkatan produksi nasional yang mana hal tersebut terjadi karena dorongan dari pemerintah. Penetunan sistem dan keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan sangat ditentukan dari sejarah dan pengalaman penerapannya dalam mengelola suatu negara.

Konsep-Konsep Pemikiran

Konsep yang diterapkan dalam mengurangi dampak melemahnya perekonomian akibat pandemi yakni dengan penerapan kebijakan fiskal yang berfokus pada pendapatan dan juga anggaran belanja negara. Pemerintah cenderung hanya memperhatikan adanya kontribusi pada pendapatan yang diperoleh dari PPN dan PPh. Pemerintah juga perlu memberikan perhatiannya dalam aspek

perealisasian dana agar tepat sasaran dan berfokus pada aktivitas yang prioritas dalam usaha pencegahan penyebaran covid-19. Keadaan ekonomi negara akan sangat ditentukan dari penerapan kebijakan dan kesigapan dalam menghadapi masalah, selain itu dukungan sistem dan perilaku masyarakat juga sangat dibutuhkan. Dalam usaha peningkatan ekonomi pada saat pandemi pemerintah menjadi sentral terpenting, pasalnya pada kegiatan konsumsi (c), investasi, dan urusan perdagangan internasional (x-m) secara tidak langsung terganggu sehingga mengakibatkan penurunan. Oleh sebab itu melalui regulasi yang diterapkan pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat menentukan naik ataupun turunnya perekonomian negara.

Variabel dan Indakor yang dibahas

1. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan yang diterima oleh pemerintah bersumber dari hasil penerimaan dari dana yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan dana dari hibah. Menurut Dumairy (1997) dalam Dina (2020), penerimaan dari dalam negeri bersumber atas penerimaan pembayaran pajak berupa : 1) Pajak penghasilan (PPh), 2) Pajak pertambahan nilai barang dab jasa (PPN) dan pajak ats penjualan barang mewah (PPnBM), 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 4) Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB), 5) Pajak lainnya, dan 6) Cukai. Menurut penelitian dari Parmadi (2011), bentuk struktur pajak yang berkembang di Indonesia sudah banyak didominasi oleh penerimaan pajak secara langsung (Pajak dari penghasilan) walaupun pajak yang berasal dari penerimaan tidak langsung juga masih cukup banyak, sedangkan dilihat dari penerimaan hasil perpajakan dari produk domestik bruto juga terus mengalami peningkatan.

Pemerintah terus berencana untuk meningkatkan penerimaan pada sektor perpajakan dengan menerapkan strategi-strategi untuk tercapainya pertumbuhan dan pembagunan ekonomi yang berkesinambungan (Kemenkeu, 2017). Dalam usaha peningkatan penrimaan pajak tersebut pemerintah melakukan pembaharuan terhadap sistem perpajakan yang semakin mengarah pada prinsip keadilan dalam proses pemungutan pajak. Perlu diketahui bahwa tidak selamanya pajak membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mdanat (2018) menemukan bahwa tidak selamanya peningkatan pajak menyebabkan perekonomian juga tumbuh. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan dari pajak digunakan untuk mendanai aktivits atau proyek yang kurang produktif (*non-productive expenditure*). Pada struktur pendapatan negara penerimaan pajak juga berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran yang berasal dari pemerintah merupakan semua akumulasi pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah dalam membiayai aktivitas-aktivas pemerintahan guna menjalankan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Mankew (2013) tiap tambahan belanja negara tidak hanya bisa merelokasikan sumber daya bagi sektor swasta terhadap pemerintahan, namun juga akan diikuti dengan adanya multiplierefect dari belanja tersebut. Dasar teori dari kegiatan pengeluaran pemerintah dapat digambarkan melalui persamaan keseimbangan pendapatan nasional yakni : Y = C+I+G+(X-M). Persamaaan tersebut menjelaskan bahwa setiap adanya kenaikan atau penurunan yang berasal dari pengeluran pemerintah akan bisa menaikkan atau bahkan menurunkan jumlah pendapatan nasional.

Pajak yang diterima oleh pemerintah sebagai pendapatan negara yang mana kemudian akan dialokasikan untuk pendanaan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Menurut Boediono (1988) dalam Dina dan rasita (2020), pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah digolongkan menjadi tiga pokok utama yang meliputi : 1) pengeluaran untuk pembelian barang maupun jasa, 2) pembayaran gaji pegawai, 3) pengeluaran dalam kegiatan transfer pembayaran.

Hasil Penelitian Terdahulu

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan bagaimana pemerintah berperan dalam mengatasi masalah perekonomian pada saat pandemi melalui kebijakan yang diterapkan salah satunya penyesuain kebijakan fiskal. Banyak studi yang sudah dilakukan guna mengetahui fleksibilitas penerimaan dari pajak yang menjadi instrument kebijakan fiskal dalam menghadapi permasalahan krisis pada perekonomian yang diakibatkan wabah dari covid-19. Penelitian dari Adiyanta (2020) menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi pada saat pandemi tidak lepas dari strategi pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal yang dirasa mampu mereformasi peraturan dan sistem perpajakan yamg lebih modern. Adanya pajak berperan besar dalam menjaga kestabialan perekonomian akibat adanya kontraksi maupun relaksasi ekonomi, dan sebagai antisispasi lemahnya perekonomian global sehingga pemerintah bisa mengoptimalkan anggaran yang digunakan untuk belanja negara.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Silalahi *et all* (2020) yang menjelaskan menjelaskan kebijakan fiskal ditekankan pada sisi penerimaan dan juga pengeluaran dari pemerintah. Pada sisi penerimaan untuk mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan perlu adanya revisi pada penerimaan yang bersumber dari pajak, melakukan realokasi APBN 2020 untuk hal pendapatan, dan beralih pada perpajakan digitalisasi. Sedangkan pada sisi pengeluaran pemerintah melakukan pengurangan deficit dari APBN dengan merevisi anggaran. Ardiansyah

(2014) mengemukakan bahwa pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan sektor pajak memiliki korelasi yang positif, namun pertumbuhan dari penerimaan pajak tidak berjalan secepat laju dari pertumbuhan ekonomi yang diukur pada GDP Growth. Dari hal tersebut dapat digambarkan bahwa sektor pajak memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan negara.

III. PENDEKATAN DAN METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian yang masuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), yakni bersumber dari literatur baik berupa buku, jurnal, catatan, data publikasi dari website resmi, ataupun laporan hasil penelitian terdahulu. Pada karya tulis ini menggunakan metode penelitian kulitatif deskriptif. Dimana metode ini dipilih untuk menguraikan tulisan, ucapan, ataupun perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam konteks tertentu yang dikaji dari berbagai sudut pandang yang dapat dilihat dari berbagai sisi, utuh, dan secara menyeluruh. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk menelusuri ataupun mengeksplorasi adanya hubungan sosial dan penjabaran nyata dari apa yang dialami oleh responden. Penelitian deskriptif dipilih guna menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyusunan data, yang kemudian perlu adanya analisis lebih lanjut terhadap data yang telah didapatkan. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang didapat dari sumber-sumber seperti kementerian dan badan pusat statistik.

IV. PEMBAHASAN

Situasi pandemi covid-19 yang terjadi menjadikan pemerintah harus berfikir untuk menerapkan berbagai starategi guna menstabilakan keadaa ekonomi yang melemah akibat terganggunya aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian. Melalui kebijakan fiskal pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan refocusing pada kegiatan juga mengatur realokasi pada anggaran yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan, pendistribusian penghasilan, peluang menyediakan kesempatan kerja, dan peluang investasi. Adanya penyusunan kebijakan dalam APBN pada 2021 untuk menangani keberlanjutan strategi menjaga perekonomian dan pemulihan ekonomi pada tahun 2020. Menurut Dhyaksa (2020) kebijakan yang diambil pemerintah untuk menghadapi dampak pandemi meliputi : dukungan dan insetif bulanan pada bidang kesehatan juga tenaga medis, penurunan tarif listrik, menambah anggaran untuk kartu pra kerja, mengantisispasi adanya defisit APBN, perlindungan sosial juga pemulihan ekonomi, keringanan angsuran pada nasabah KUR, refocusing dan perelokasian belanja, juga menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Suryahadi (2020) melalui penelitiannya memperkirakan adanya covid-19 dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada rentang 1 dan 4 persen di

Indonesia. Tidak hanya itu Kementerian Keuangan juga berproyeksi bahwa adanya wabah akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Banyak usaha yang mengalami kemunduran karena pandemi, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak terutama dari pajak penghasilan yang diterima pemerintah (Amri, 2020). Menurut ekonom dunia Olivier Blanchard yang berpendapat bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga peran dalam mengatasi pandemi yakni : kebijakan fiskal dalam penanganan infeksi dan insetif kepada perusahaan yang berproduksi pasa bidang obat-obatan dan vaksin, kebijakan fiskal memberikan dana kepada rumah tangga usaha yang terdampak pandemi, dan yang terakhir kebijakan fiskal mendukung adanya permintaan agregat dengan memastikan ekonomi tetap berjalan lanjar ditengah penerapan protokol kesehatan (Kacaribu,2020).

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia guna menjaga stabilitas perekonomian negara yang diterapkan pemerintah meliputi :

- Pelaksanaan Refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebagai upaya mengefisiensi pengeluaran dari dana yang dimiliki negara. Kegiatan refocusing ini bertujuan untuk mengelompokan, menunda, ataupun meniadakan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk kedalam prioritas dan tidak memiliki relevansi dengan keadaan yang terjadi saat ini. Pemerintah juga melakukan strategi penghematan dengan menunda pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan upaya penanggulangan wabah. Adapun reaalisasi pembiayaan yang bersumber dari APBN sampai april 2020 mencapai angka Rp.221,84 triliun dan terus mengalami peningkatan sampai angka 53,58%, yang mana sumber utamanya dari pembiayaan hutang (Kemenkeu,go.id, 2020).
- Insentif pajak menjadi salah satu usaha pemerintah dalam mendorong adanya penanaman modal untuk menarik investor luar negeri. Adanya insetif pajak juga bertujuan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli dari masyarakat, dan menjaga produktivitas sektor lain agar tetap stabil ketika masa pandemi covid-19 terjadi. Pembebanan pajak yang dilakukan secara adil memungkinkan kebijakan fiskal yang diterapkan melalui instrument pajak dapat mendorong adanya stabilitas ekonomi serta fiskal.
- Kegiatan bantuan sosial (bansos). Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah guna memberikan dorongan agar tingkat konsumsi dan daya beli dari masyarakat tetap kuat disituasi pandemi (Arieza, 2020). Adanya bantuan sosial yabg diberikan pemerintah baik berupa uang ataupun bahan sembako dinilai sangat berguna bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang meliputi adanya penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran dimana KPK menerima banyak laporan terkait pemberian bansos yang tercatat sebanyak 1,650

laporan dari masyarakat (Ipi Maryati dalam Ramadhan, 2020). Tidak hanya itu permasalahan lainya juga datang dari kasus korupsi yang dilakukan menteri sosial yang menggelapkan dana sembako didaerah Jabodetabek dan ditetapkan bagai tersangka kasus korupsi oleh KPK (Permatasari, 2020).

V. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan fiskal pada saat pandemi memiliki dampak yang besar pada keberlangsungan ekonomi negara Indonesia yang mana kala itu sangat terguncang karena adanya pandemi. Pemerintah membuat regulasi yang dinilai mampu menggerakkan perekonomian nasional yang mana meliputi dari segi perpajakan, meminimalisir pengeluaran dana APBN, memberikan bantuan sosial berupa uang tunai maupun sembako kepada masyarakat yang terdampak, dan pemerintah mendorong terciptanya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Penguatan kebijakan fiskal ini sangat penting guna meningkatkan ekonomi negara yang melemah akibat dari pandemi. Semua regulasi yang diterapkan memberikan dampak besar pada perekonomian, walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala. Ekonomi suatu negara tidak akan membaik jika pemerintah tidak punya strategi yang tepat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, namun pemerintah Indonesia sangat tanggap dalam mengatasi situasi tersebut hingga akhirnya keadaan ekonomi negara kita dapat terkendali sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, S., 2020. Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal,* 2(1), pp. 162-181.

Adriansyah, B. G., 2014. Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. *Badan Kebijakan Fiskal* , 18(1).

Amri, 2020. Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti DataPanel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman,* pp. 1-18.

Arieza, U., 2020. Melihat Lagi Manfaat Bansos Selamatkan Ekonomi RI dari Resesi. *CNN Indonesia.*

Ayu Feranika, D. h., 2020. Strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak virus covid-19. *Business innovation & entrepreneurship journal,* 2(3), pp. 146-152.

Dhyaksa, A., 2020. *Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Dalam Menghadapi WabahCorona.* [Online].

Dina Eva, R. R., 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah,* 3(2).

Farah aunti sholihah, B. u. h. m. s. n. r. s. Z., 2020. The role of fiscal policy in strengthening the reslience of the national economy (fiscal case study during the covid-19 pandemic). 7(1), pp. 97-106.

Fathurrahman, A., 2012. Kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi islam : studi kasus dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan,* 13(1).

Fauziyah aqmarina, i. k. F., 2020. Peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19. *Jurnal akuntansi dan perbankan syariah,* 3(2), pp. 255-274.

Feranika, A. H. D., 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal,* 2(3), p. 146–152. https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.

Heliany, I., 2021. Peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. 8(1), pp. 15-21.

Hertinawati, 2021. Analisa terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi covid-19. *Jurnal Sekuritas,* 4(1), pp. 118-130.

Https:///covid-19.go.id/id, n.d.

Juliani, H., 2020. Kebijakan fiskal : Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi covid-19. *Adsminitrative law and governance journal,* 3(4), pp. 595-615.

Kacaribu, F., 2020. Survival, Kebijakan Fiskal Di Tengan Pandemi: Moving Beyond. *Warta Fiskal,* pp. 1-52.

Kemenkeu.go.id., 2020. *Ke-bijakan Fiskal dan Moneter Menanggapi Dam-pak Covid.* [Online].

Kementerian Keuangan, R. I., 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.* [Online].

Kurnia Putri Mirani, A. N. M. & Nila cahyarani, A. m., 2021. Strategi kebijakan fiskal pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19. *Jurnal ilmiah akuntansi,* 5(2), pp. 193-204.

Lativa, S., 2021. Analisis kebijakan fiskal Indonesia pada masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan perekonomian. 23(3), pp. 161-175.

Mdanat, M. F. e. a., 2018. Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. *EuroMed Journal of Business,* 13(1), pp. 102-127, https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0030.

Permatasari, A. N., 2020. *Mensos Juliari Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Kronologi OTT KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Corona.* s.l., Kompas.Tv.

Ramadhan, A., 2020. *KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat soal Penyaluran Bansos Covid-19.* s.l., Kompas.Com.

Reni opriyanti, R. n. w., 2017. Analisa efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi di Indonesia. *Media trend,* 12(2), pp. 184-198.

Saragih, A. H., 2018. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal SIKAP,* 3(1), pp. 17-27.

Setiawan, H., 2018. Analysis of the impact of fiscal and monetary policy on Indonesian macroeconomic performance with model structural vector autoregression (svar). *Jurnal ilmu ekonomi terapan,* Volume 31, pp. 95-109.

Silalahi, e. a., 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah,* 3(2), pp. 156-167.

Silalahi, G., 2020. Strategi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemic covid-19. *Jesya (jurnal ekonomi dan ekonomi syariah).*

Sudirman, I. w., 2011. *Kebijakan fiskal dan moneter teori & empirikal.* Jakarta: kencana.

Suryahadi, A. e. a., 2020. *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia.* Jakarta: Smeru working Paper. The Smeru Research Institute.

Zurjani, N., 2019. Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *QE Journal,* 2(3), pp. 36-511.